

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Berdasarkan ketetapan MPR No.XV/MPR/1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2000. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Bratakusumah dan Solihin (2001:2) otonomi daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, yang mana daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Menurut UU No.32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih dalam mengatur rumah tangganya.

Keputusan menerapakan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia

adalah “Money Follows Functions” yaitu fungsi pokok pelayanan publik didaerah, dengan dukungan pembiayaan pusat melalui peyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Siagian, 2010:3). Sumber-sumber penerimaan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berupa DAU serta dana otonomi khusus diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua yaitu pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang, yaitu suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh tahun, dua puluh tahun, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama. Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri (Boediono, 1985:1)

Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu Negara. Pembangunan ekonomi meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan

pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembangunan suatu Negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Besarnya pendapatan pemerintah sangat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran pemerintah (Ulupui, 2015). Hal ini terjadi karena pendanaan pengeluaran pemerintah bersumber dari pendapatan daerah atau pinjaman. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apabila suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Secara teori pendapatan asli daerah didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Endrawati (2010) semakin besar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain lain pendapatan yang sah, maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan. Semakin kecil pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah di suatu daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi. Penentuan dana alokasi umum dilakukan untuk memperhatikan kebutuhan suatu daerah. Hal ini mengindikasi jika terjadi peningkatan dana alokasi umum maka kemandirian suatu daerah akan semakin rendah. Dana Alokasi umum bersumber dari pendapatan APBN. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Timur berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini tercapainya kesejahteraan di Kabupaten Nagekeo.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Nagekeo perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan data yang dimuat pada website resmi BPS Kabupaten Nagekeo Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo Menurut Jenis Penerimaan (Miliaran Rupiah) dalam kurun waktu tiga tahun dapat disajikan dalam tabel Sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Nagekeo menurut Jenis Penerimaan (Ribu Rupiah)

	Tahun Anggaran									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	29.276.706.505,00	30.825.974.939,00	31.124.850.353,00	31.068.286.543,57	34.492.769.317,00	30.925.601.941,48	52.210.826.688	34.260.033.777,09	48.349.982.880,00	34.523.008.256,82
Dana Alokasi Umum	432.406.320.000,00	432.406.320.000,00	454.351.825.000,00	454.351.825.000,00	414.631.577.000,00	407.222.571.000,00	407.517.873.000,00	407.250.885.737,00	426.686.732.000,00	429.727.937,00

Sumber : BKD Kabupaten Nagekeo,2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Nagekeo berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) pendapatan pada tahun 2019 anggaran yang ada sebesar 29.276.706.505,00 dan terealisasi sebesar 30.825.974,00 maka pada tahun 2019 mengalami defisit dana, pada tahun 2020 anggaran yang ada sebesar 31.124.850.353,00 dan terealisasi sebesar 31.068.286.543,57 ,maka pada tahun 2020 mengalami surplus dana tetapi tidak dalam jumlah yang besar. Pada tahun 2021 anggaran yang ada sebesar 34.492.769.317,00 dan terealisasi sebesar 30.925.601.941,48, maka pada tahun 2021 mengalami surplus dana. Pada tahun 2022 anggaran yang ada 52.210.826.688 dan terealisasi 34.260.033.777,09, maka tahun 2022 mengalami surplus dana. Pada tahun 2023 anggaran yang ada sebesar 48.349.982.880,00 dan terealisasi 34.523.008.256,82 maka tahun 2023 mengalami surplus dana. Jadi pendapatan asli daerah kabupaten Nagekeo mengalami penurunan selama satu tahun dan mengalami peningkatan selama empat tahun. Sedangkan dana alokasi umum pada tahun 2019 anggaran yang ada sebesar 432.406.320.000,00 dan terealisasi sebesar 432.406.320.000,00 maka pada tahun 2019 anggaran habis

terpakai, pada tahun 2020 anggaran yang ada sebesar 454.351.825.000,00 dan terealisasi sebesar 454.351.825.000,00 maka pada tahun 2020 dana habis tepakai, pada tahun 2021 anggaran yang ada sebesar 414.631.577.000,00 dan terealisasi sebesar 407.222.571.000,00 maka dana mengalami surplus, pada tahun 2022 anggaran yang ada sebesar 407.517.873.000,00 dan terealisasi sebesar 407.250.885.737,00 maka dana mengalami surplus, pada tahun 2023 anggaran yang ada sebesar 426.686.732.000,00 dan terealisasi sebesar 429.727.937,00 maka dana mengalami defisit. Jadi dana alokasi umum pada empat tahun terakhir mengalami kenaikan dan satu tahun terakhir mengalami penurunan.

Secara administrasi, pemerintahan wilayah Kabupaten Nagekeo sampai dengan tahun 2015 terbagi dalam 7 Kecamatan dan 97 desa/kelurahan dengan ibu Kota adalah Mbay yang terletak di Kecamatan Aesesa. Kondisi topografi kabupaten ini sebagian besar merupakan kawasan perbukitan dengan kemiringan 16°-60° yang luasnya mencapai 141.696 km² atau 37,16% dari luas wilayah daratan. Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB perkapita di Kabupaten Nagekeo selama kurun waktu 2018-2020 cenderung meningkat, yang menunjukkan tingginya tingkat kesejahteraan di Kabupaten Nagekeo. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatnya kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari perkembangan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang disajikan secara berkala setiap tahunnya.

Peneliti terdahulu yang sesuai dengan penelitian saya adalah sebagai berikut: Menurut hasil penelitian terdahulu Mamuka (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi.

Istiqamah (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. Artinya semangkin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin mendorong tingkat Pertumbuhan Ekonomi yang lebih tinggi. Variabel Dana Alokasi Umum (X2) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. Artinya dengan adanya Dana Alokasi Umum yang di transfer oleh pemerintah pusat juga dapat mendorong tingkat Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut. Hasil pengujian secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan

Ekonomi menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Putri (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor.

Putri (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. (2) Pendapatan Asli Daerah secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (3) Belanja Modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (4) Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung melalui Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. (5) Dana Perimbangan secara tidak langsung melalui Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Sumual (2016) melakukan penelitian tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Analisis Penelitian ini yaitu analisis jalur/Path analysis dengan model regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan secara parsial dan simultan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Kemiskinan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Mamuka (2019) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan Menurut Tiana Raharni Putri (2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menjadi indikasi bahwa terpengaruhnya PAD dan Pertumbuhan Ekonomi atas dampak dari pandemic Covid-19 yang sedang melanda di seluruh dunia khususnya Kota Bogor ini. Hasil yang di dapat dari penelitian Mamuka (2019) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hal ini menimbulkan *research gap* (celah penelitian) dengan adanya hasil penelitian yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Karena kondisi tersebut sangat penting dan memberikan motivasi untuk melakukan penelitian mengenai variabel yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagekeo.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul **”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana alokasi umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Nagekeo Tahun 2013-2023”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagekeo Tahun 2013-2023.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas:

- a. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagekeo tahun 2013-2023 ?
- b. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagekeo tahun 2013-2023?

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan pada persoalan diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan

- ekonomi di Kabupaten Nagekeo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagekeo.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakan penelitian ini:

a. Manfaat Akademik

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pengembangan teori-teori atau ilmu pengetahuan terutama di bidang ekonomi, juga dapat menambah gambaran dan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU,) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, terutama bagi Dosen, dan mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana.
2. Bagi pembaca dan penelitian lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap hasil penelitian lain yang telah dilakukan, serta dapat dijadikan sebagai tambahan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Nagekeo, penelitian ini memberikan input atau masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU,) terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga dapat mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.